



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 51 (0751) 31401-31402-34425 Padang
<http://www.sumbar.go.id>. e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 812/ 10013 /BKD-2022

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah alokasi formasi sebanyak **205** (dua ratus lima) formasi. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman di <https://bkd.sumbarprov.go.id/>.

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 803 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis. Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis;
9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan
10. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK TEKNIS

1. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
3. Persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
4. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jabatan Fungsional yang mempersyaratkan kompetensi dapat dilihat pada laman <https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/913-persyaratan-wajib-tambahan-dan-sertifikasi-kompetensi-tambahan-nilai-seleksi-kompetensi-teknis-pppk-.html>;
5. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan PPPK ini adalah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* pada laman resmi BKN di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
2. Sebelum melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk membaca dan memahami panduan pendaftaran secara lengkap yang dapat diunduh pada laman tersebut;
3. Agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan pendaftaran, pelamar diminta untuk memperhatikan dengan cermat setiap keterangan / instruksi / pemberitahuan / peringatan yang muncul di laman pendaftaran *online* tersebut dan pastikan semua data terisi dengan benar;
4. Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL;
5. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
6. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
7. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan jabatan PPPK untuk JF Teknik sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
8. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.
9. Pelamar mengisi data.
10. Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen asli, berwarna, lengkap (tidak terpotong), serta dapat dibaca dengan jelas;
11. Klik centang pada setiap data di form Resume dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar, kemudian Akhiri Proses Pendaftaran. **Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;**
12. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2022, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran.

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar PPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan warna** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat Lamaran **diketik** yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah, ditandatangani serta dibubuhi **meterai tempel atau meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat lamaran dapat diunduh di website <https://bkd.sumbarprov.go.id/>, link meterai elektronik **http://e-meterai.co.id/**);
3. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan.
6. Surat Pernyataan 5 (lima) poin diketik yang ditandatangani oleh pelamar dibubuhi **meterei tempel atau meterai elektronik Rp. 10.000** (format surat pernyataan dapat diunduh di website <https://bkd.sumbarprov.go.id/>);
7. Surat Keterangan memiliki pengalaman sesuai dengan jabatan yang dilamar ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan poin III angka 3 di atas;
8. Sertifikat kompetensi/keahlian tertentu yang masih berlaku untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sertifikat kompetensi/keahlian sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis;
10. Khusus bagi penyandang disabilitas, selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran di atas ditambah dengan:
 - a. Surat Keterangan Asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis.
11. Jika dokumen yang diunggah bukan dokumen asli, tidak berwarna, tidak lengkap, tidak jelas/tidak dapat dibaca, dan tidak sesuai format, maka **dianggap tidak memenuhi syarat**.

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

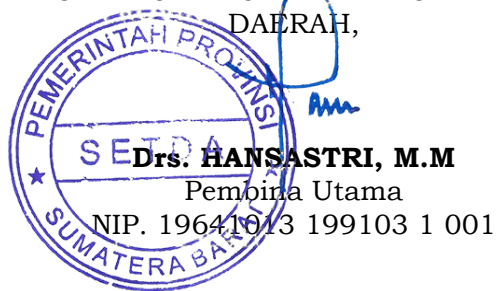
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun Anggaran 2022 lebih lanjut akan diinformasikan pada dilaman <https://bkd.sumbarprov/go.id/>.

VIII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan permasalahan data NIK, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil usaha peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi pada laman <https://bkd.sumbarprov/go.id/>;
6. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat menghubungi *Call Center* pada nomor **0821 7039 5795** setiap hari kerja pukul 08.00- 16.00 WIB;
7. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman dan dalam melakukan pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta.

Padang, 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI
DAERAH,



**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV ILMU GIZI / S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN, KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV ILMU GIZI / S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN, KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV ILMU GIZI / S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KONSUMSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN, KEPALA SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV ILMU GIZI / S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN, KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	D-IV ILMU GIZI / S-1 AGRIBISNIS PERTANIAN / S-1 GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KONSUMSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
6	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA UPTD DISTRIBUSI, PASOKAN DAN AKSES PANGAN DINAS PANGAN, KEPALA SEKSI PENYALURAN UPTD DISTRIBUSI, PASOKAN DAN AKSES PANGAN
7	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEPALA SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
8	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA	4	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA PAYAKUMBUH, KEPALA SEKSI PELATIHAN
9	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	S-1 TEKNIK MESIN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK BANGUNAN / D-IV PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN	4	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADANG PANJANG, KEPALA SEKSI PELATIHAN
10	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA, KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN
11	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN, KEPALA SEKSI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
12	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KABID KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, KASI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PASCA PANEN
13	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD RUMAH SAKIT HEWAN, KASI KLINIK
14	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD RUMAH SAKIT HEWAN, KASI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
15	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI, KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI, KEPALA SEKSI PENGATURAN
16	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-IV TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 KIMIA / S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN / D-IV PERIKANAN TANGKAP	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
17	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PLANOLOGI / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG TATA RUANG, KASI PENERTIBAN TATA RUANG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
18	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PLANOLOGI / S-1/D-IV TEKNIK SIPIIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG TATA RUANG, KASI PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG
19	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PLANOLOGI / S-1/D-IV TEKNIK SIPIIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG TATA RUANG, KASI PENGENDALIAN TATA RUANG
20	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEPALA SEKSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
21	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEPALA SEKSI INFORMASI PASAR KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
22	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 BIOLOGI / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI	5	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (BPSB), KEPALA SEKSI PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
23	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	S-1 BIOLOGI / S-1 AGRONOMI / S-1 AGROTEKNOLOGI	1	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (BPPMBPTP), KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH
24	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 KIMIA	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN, KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
25	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN, KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN
26	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG HORTIKULTURA, KEPALA SEKSI PASCA PANEN TANAMAN HORTIKULTURA
27	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG PERKEBUNAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH, KEPALA SEKSI PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL
28	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN DINAS PANGAN, KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI PANGAN
29	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG HORTIKULTURA, KEPALA SEKSI SAYURAN DAN BIOFARMAKA
30	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, KEPALA SEKSI PADI DAN PALAWIJA
31	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG PERKEBUNAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR, KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN PENANGANAN PASCA PANEN
32	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROBISNIS / S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN, KEPALA BIDANG KEAMANAN PANGAN, KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN
33	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 BIOLOGI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / S-1 KIMIA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, KEPALA SEKSI PASCA PANEN TANAMAN PANGAN
34	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 OCEANOGRAFI / D-IV PERIKANAN TANGKAP	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA SEKSI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
35	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 OCEANOGRAFI / D-IV PERIKANAN TANGKAP	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PAKAN IKAN
36	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	S-1 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERAIRAN / S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN / S-1 ILMU KELAUTAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 OCEANOGRAFI / D-IV PERIKANAN TANGKAP	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP, KEPALA SEKSI KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT TANGKAP IKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
37	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 HUKUM PERDATA / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL	3	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA, KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, KASUBAG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
38	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL BUKIT BARISAN, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
39	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SOLOK, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
40	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
41	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, KEPALA SEKSI PEMANFAATAN & PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
42	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
43	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
44	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN, KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
45	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN TATA HUTAN
46	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
47	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 PROTEKSI TANAMAN / S-1 BIOLOGI	2	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (BPPMBPTP), KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
48	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BIOLOGI	4	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN UPTD BPTPH
49	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BIOLOGI	3	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), KEPALA SEKSI PRASARANA PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA UPTD BPTPH
50	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	S-1 MATEMATIKA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 BIOLOGI / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 KIMIA / S-1 FISIKA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS
51	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL BUKIT BARISAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
52	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
53	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
54	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
55	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
56	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
57	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL PASAMAN RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
58	AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	S-1 TEKNOLOGI PERIKANAN / S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 NUTRISI MAKANAN TERNAK / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPALA BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI, KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
59	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN TATA HUTAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
60	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN
61	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN, KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN
62	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH
63	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
64	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
65	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
66	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL BUKIT BARISAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
67	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTIM
68	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
69	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
70	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENGAMANAN HUTAN
71	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM PIDANA	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
72	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGENDALIAN INFORMATIKA
73	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI
74	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
75	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG SIBER DAN SANDI, KEPALA SEKSI TATA KELOLA KEAMANAN SIBER DAN SANDI
76	AHLI PERTAMA - STATISTISI	D-IV STATISTIK / S-1 STATISTIK	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL, KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTOR SOSIAL BUDAYA
77	AHLI PERTAMA - STATISTISI	D-IV STATISTIK / S-1 STATISTIK	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL, KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTOR EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
78	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG BINA MARGA, KASI PERENCANAAN TEKNIS DAN EVALUASI
79	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI, KEPALA UPTD BALAI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA, KEPALA SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN UPTD BALAI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA
80	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI, KEPALA UPTD BALAI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN, KEPALA SEKSI PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN UPTD BALAI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN
81	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG CIPTA KARYA, KASI PERENCANAAN DAN EVALUASI
82	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG CIPTA KARYA, KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
83	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG, KEPALA BIDANG CIPTA KARYA, KASI PERENCANAAN DAN EVALUASI
84	PEMULA - ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	SMA OLAH RAGA	3	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEPALA UPTD KEBAKATAN OLAHRAGA, KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
85	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	SMK PERTANIAN	4	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN UPTD BPTPH
86	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL PASAMAN RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
87	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
88	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
89	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SOLOK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
90	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
91	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
92	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
93	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL PASAMAN RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
94	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
95	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
96	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTIM
97	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENGAMANAN HUTAN
98	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
99	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
100	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
101	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SOLOK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
102	PEMULA - POLISI KEHUTANAN	SKMA / SMK KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
103	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
104	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III KEARSIPAN	1	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RSUD DR ACHMAD MOCHTAR, WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN, KEPALA BAGIAN UMUM, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
105	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KABID KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, KASI PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN
106	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KABID KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, KASI PELAYANAN DAN SARANA MEDIK
107	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD RUMAH SAKIT HEWAN, KASI KLINIK
108	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	D-III BUDIDAYA TANAMAN PANGAN / D-III BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN	6	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH (BPSB), KEPALA SEKSI PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
109	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	D-III PETERNAKAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN, KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA, KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN
110	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III BIOLOGI	30	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA (BPTPH), KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN UPTD BPTPH
111	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III BIOLOGI	2	SEKRETARIS DAERAH, DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN PENGUJIAN MUTU BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (BPPMBPTP), KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
112	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
113	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL PASAMAN RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
114	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
115	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
116	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
117	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SOLOK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
118	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
119	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTIM
120	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP DHARMASRAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
121	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
122	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHP MENTAWAI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
123	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL PASAMAN RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
124	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SOLOK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
125	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL BUKIT BARISAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
126	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	2	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL SIJUNJUNG, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
127	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL 50 KOTA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
128	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
129	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEHUTANAN, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONVERSI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENGAMANAN HUTAN
130	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA, KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
131	TERAMPIL - STATISTISI	D-III STATISTIK	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL, KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTOR EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
132	TERAMPIL - STATISTISI	D-III STATISTIK	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK, KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL, KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTOR SOSIAL BUDAYA
TOTAL			205	

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,



Drs. HANSASTRI, M.M
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001